

## TEORI DAN KONSEP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Shelty D.M. Sumual<sup>1</sup>, Michella Christy Tania Supit<sup>2</sup>, Anastasya Fabiola Matindas<sup>3</sup>,  
Christian Bagensa<sup>4</sup>

[sheltysumual@unima.ac.id](mailto:sheltysumual@unima.ac.id)<sup>1</sup>, [supitmichhella9@gmail.com](mailto:supitmichhella9@gmail.com)<sup>2</sup>, [anastasyamatindas10@gmail.com](mailto:anastasyamatindas10@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[chandra.bagensa@gmail.com](mailto:chandra.bagensa@gmail.com)<sup>4</sup>

Pascasarjana Universitas Negeri Manado

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep pembiayaan pendidikan, jenis pembiayaan pendidikan, sumber pembiayaan pendidikan, biaya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat dan tidak langsung menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. Dengan memahami berbagai jenis pembiayaan pendidikan, pengelola pendidikan diharapkan mampu menyusun strategi penganggaran dan alokasi dana yang tepat sasaran. Transparansi, efisiensi, dan keadilan menjadi prinsip dasar dalam sistem pembiayaan pendidikan yang ideal di era modern ini. pemahaman dan pengelolaan biaya operasional pendidikan menjadi bagian penting dalam tata kelola pendidikan yang baik. Pengambilan keputusan terkait anggaran harus berdasarkan pada perencanaan strategis, akuntabilitas, serta transparansi untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pendidikan.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, Pendidikan.

### ABSTRACT

*This study aims to describe the concept of education financing, types of education financing, sources of education financing, costs. The research method used is a literature study. That education financing is one of the resources in the form of money, energy or goods that can directly and indirectly support the effectiveness and implementation of education management. By understanding the various types of education financing, education managers are expected to be able to develop a budgeting strategy and allocation of funds that are right on target. Transparency, efficiency and fairness are the basic principles in an ideal education financing system in this modern era. understanding and managing education operational costs is an important part of good education governance. Budget-related decision-making should be based on strategic planning, accountability and transparency to ensure the sustainability and quality of education.*

**Keywords:** Financing, Education.

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Namun, akses terhadap pendidikan yang bermutu masih menjadi tantangan besar, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu faktor utama yang memengaruhi akses ini adalah pembiayaan pendidikan. Kesenjangan ekonomi, ketimpangan distribusi sumber daya, dan kebijakan fiskal yang belum optimal sering kali menjadi penghambat dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Di Indonesia, meskipun telah terjadi peningkatan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang, ketimpangan akses masih nyata. Data dari World Education Inequality Database oleh UNESCO menunjukkan bahwa pada tahun 2012, hanya 5% pemuda usia 18–22 tahun dari kelompok termiskin yang mengenyam pendidikan tinggi, dibandingkan dengan 35% dari kelompok terkaya. Meskipun program beasiswa seperti KIP Kuliah Merdeka telah diluncurkan, tantangan dalam distribusi dan efektivitas program tersebut masih perlu mendapat perhatian serius.

Selain itu, biaya pendidikan yang tinggi menjadi beban bagi banyak keluarga. Menurut data Susenas 2021, rata-rata biaya pendidikan tahunan di perguruan tinggi negeri mencapai sekitar 12,71 juta IDR, sementara di perguruan tinggi swasta mencapai 17,01 juta IDR . Biaya ini hampir lima kali lipat dari rata-rata upah minimum provinsi, menunjukkan betapa beratnya beban finansial yang harus ditanggung oleh mahasiswa dan keluarganya.

Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada akses, tetapi juga pada kualitas pendidikan yang diterima. Sekolah dan perguruan tinggi di daerah dengan sumber daya terbatas sering kali menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Hal ini memperkuat siklus ketimpangan, di mana individu dari latar belakang ekonomi rendah memiliki peluang yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan, pada gilirannya, pekerjaan yang layak.

Dalam konteks global, krisis pembiayaan pendidikan juga menjadi perhatian. Di Amerika Serikat, misalnya, utang mahasiswa telah mencapai angka yang mengkhawatirkan, dengan rata-rata utang sebesar \$35.000 per lulusan pada tahun 2015 . Model pembiayaan yang bergantung pada pinjaman berbunga tinggi telah menimbulkan beban jangka panjang bagi lulusan dan memperkuat ketimpangan sosial-ekonomi.

Teori modal manusia (*human capital theory*) yang dikembangkan oleh ekonom seperti Gary Becker dan Theodore Schultz menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan akan meningkatkan produktivitas individu dan, pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi . Namun, dalam praktiknya, teori ini menghadapi tantangan ketika akses terhadap pendidikan berkualitas tidak merata dan biaya pendidikan menjadi penghalang utama.

Di Indonesia, upaya untuk mengatasi tantangan pembiayaan pendidikan telah dilakukan melalui berbagai program, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). PIP, misalnya, telah menunjukkan peningkatan partisipasi sekolah di kalangan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah . Namun, efektivitas program-program ini masih perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mencapai sasaran dan mengurangi ketimpangan akses pendidikan.

Dalam kajian ini, penting untuk menggali lebih dalam konsep dan teori pembiayaan pendidikan, serta mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Dengan memahami akar permasalahan dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada, diharapkan dapat dirumuskan strategi pembiayaan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas.

## **METODOLOGI**

Metode pada penulisan ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. menurut Nazir (2003) Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Juga, Studi kepustakaan menurut Syaibani (2012) adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola pendidikan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas proses dan hasil belajar. Konsep pembiayaan pendidikan mencakup segala upaya yang berkaitan dengan perencanaan, pengalokasian, pengelolaan, serta evaluasi dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi.

Menurut Mulyasa (2021), pembiayaan pendidikan bukan hanya sekadar proses alokasi dana, tetapi merupakan bagian dari strategi pembangunan pendidikan nasional yang sistematis. Dalam sistem pendidikan modern, pembiayaan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta, sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembiayaan yang memadai dan tepat sasaran menjadi syarat utama dalam menjamin pemerataan akses, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Suryadi dan Susilana (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan yang adil harus memperhatikan disparitas wilayah, kebutuhan peserta didik, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis kebutuhan (*needs-based budgeting*) menjadi semakin relevan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan pendidikan.

Di sisi lain, efektivitas pembiayaan pendidikan sangat bergantung pada sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Arifin (2023), lemahnya kapasitas kelembagaan dan kurangnya koordinasi antarlembaga sering kali menjadi hambatan dalam optimalisasi anggaran pendidikan di daerah.

Model-model pembiayaan pendidikan yang berkembang saat ini juga menekankan pentingnya efisiensi dan *outcome-based budgeting*. Artinya, alokasi dana harus didasarkan pada hasil yang ingin dicapai, bukan sekadar pada input. Konsep ini sejalan dengan paradigma baru manajemen pendidikan berbasis kinerja. Implementasi dari model ini dapat dilihat dalam Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan berbagai skema beasiswa berbasis kriteria.

Dengan demikian, konsep pembiayaan pendidikan terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Perlu adanya sistem pengawasan yang kuat dan evaluasi berkala agar pembiayaan pendidikan benar-benar dapat mendorong pencapaian tujuan pendidikan nasional.

### **B. Jenis Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Menurut Suharto (2021), pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendukung proses belajar mengajar, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun peserta didik. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pembiayaan pendidikan dikelompokkan dalam beberapa jenis, tergantung pada sumber dan bentuk penggunaannya.

Secara umum, jenis pembiayaan pendidikan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: pembiayaan publik, pembiayaan privat, dan pembiayaan campuran. Pembiayaan publik adalah pembiayaan yang berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, biasanya berbentuk anggaran pendidikan melalui APBN atau APBD. Menurut Suryadi (2022), alokasi dana pendidikan dari pemerintah minimal 20% dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, sebagai bentuk komitmen negara terhadap pendidikan nasional.

Sementara itu, pembiayaan privat berasal dari individu atau lembaga non-pemerintah, seperti orang tua siswa, yayasan, atau donatur. Pembiayaan ini umumnya digunakan pada

sekolah swasta atau pendidikan non-formal. Sebagaimana dijelaskan oleh Raharjo (2021), pembiayaan privat sering kali menjadi sumber utama dalam pembiayaan operasional lembaga pendidikan swasta, termasuk pembayaran uang sekolah, sumbangan, dan biaya ekstrakurikuler.

Jenis pembiayaan ketiga adalah pembiayaan campuran, yaitu gabungan antara dana publik dan privat. Dalam praktiknya, banyak sekolah negeri maupun swasta yang mengandalkan kombinasi dari kedua sumber tersebut. Misalnya, sekolah negeri menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah dan sekaligus memungut iuran tertentu dari wali murid. Kombinasi ini menurut Pratama dan Nuraini (2023), mampu memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Selain berdasarkan sumbernya, jenis pembiayaan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu: \*pembiayaan investasi, \*\*pembiayaan operasional, dan \*\*\*pembiayaan personal\*. Pembiayaan investasi berkaitan dengan pembangunan fisik dan pengadaan fasilitas pendidikan. Pembiayaan operasional mencakup gaji guru, pemeliharaan sekolah, dan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pembiayaan personal adalah biaya yang ditanggung langsung oleh peserta didik untuk keperluan sekolah seperti buku, seragam, dan transportasi (Nugroho & Lestari, 2022).

Dengan memahami berbagai jenis pembiayaan pendidikan, pengelola pendidikan diharapkan mampu menyusun strategi penganggaran dan alokasi dana yang tepat sasaran. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat juga perlu terus bersinergi dalam menjamin keberlangsungan pendidikan yang merata dan bermutu. Transparansi, efisiensi, dan keadilan menjadi prinsip dasar dalam sistem pembiayaan pendidikan yang ideal di era modern ini.

### **C. Sumber Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Tanpa pembiayaan yang memadai, proses pendidikan tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sumber-sumber pembiayaan pendidikan menjadi hal yang esensial dalam konteks tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.

Menurut Mulyasa (2021), pembiayaan pendidikan mencakup seluruh aktivitas pengalokasian dana yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan proses pendidikan, mulai dari gaji guru, pengadaan fasilitas, hingga program pengembangan peserta didik. Sumber dana pendidikan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, lembaga swasta, bahkan dana internasional atau hibah luar negeri.

Pemerintah melalui APBN dan APBD menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari total anggaran negara dan daerah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa alokasi ini belum selalu cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil (Suryadi, 2022).

Selain dana dari pemerintah, kontribusi masyarakat juga menjadi bagian penting dari pembiayaan pendidikan. Bentuk kontribusi masyarakat dapat berupa sumbangan sukarela, dana komite sekolah, hingga iuran pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, kontribusi ini menimbulkan kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi kalangan ekonomi lemah (Hidayat & Fitriani, 2023).

Lembaga swasta, baik nasional maupun internasional, juga memberikan peran dalam pembiayaan pendidikan. Beberapa sekolah dan universitas menjalin kerja sama dengan perusahaan atau lembaga donor untuk mendapatkan dana tambahan dalam bentuk sponsorship, beasiswa, atau dana riset. Menurut Riswandha (2021), kerja sama ini dapat

memperkuat inovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan jika dikelola secara transparan dan akuntabel.

Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan sumber pembiayaan pendidikan tetap ada. Salah satunya adalah isu ketidakefisienan dalam penggunaan dana, lemahnya sistem pengawasan, serta kurangnya transparansi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola keuangan pendidikan menjadi urgensi agar dana yang tersedia benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan berdampak nyata pada kualitas pembelajaran (Putri, 2022).

Dalam konteks ini, penting juga untuk memahami bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya sebatas alokasi dana, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sumber dana yang beragam harus dikelola secara adil dan proporsional agar tidak hanya mengandalkan satu pihak, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

#### **D. Biaya Operasional Pendidikan**

Biaya operasional pendidikan merupakan bagian penting dalam manajemen pendidikan yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan dan kelangsungan proses belajar mengajar. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan fungsi lembaga pendidikan sehari-hari, seperti gaji tenaga pendidik, pembelian alat tulis, pemeliharaan fasilitas, dan kebutuhan operasional lainnya (Rohiat, 2021).

Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, biaya operasional sering kali menjadi tantangan utama, terutama di daerah dengan anggaran terbatas. Menurut Purwanto (2022), pengelolaan biaya operasional harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas agar penggunaan dana benar-benar mendukung mutu pendidikan. Efisiensi mengacu pada kemampuan mengelola sumber daya seminimal mungkin untuk hasil maksimal, sedangkan efektivitas merujuk pada sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai melalui penggunaan dana tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui program Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) telah menjadi salah satu instrumen penting dalam penyediaan biaya operasional bagi sekolah negeri. Dana ini dialokasikan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar agar tidak sepenuhnya bergantung pada iuran dari orang tua murid. Namun, menurut penelitian oleh Hartati dan Nugroho (2023), implementasi dana BOS masih menghadapi kendala dalam pelaporan, pengawasan, dan alokasi yang kadang tidak proporsional terhadap kebutuhan riil sekolah.

Lebih lanjut, biaya operasional pendidikan juga harus disesuaikan dengan perubahan zaman, termasuk digitalisasi pendidikan. Seperti diungkapkan oleh Yuliani (2021), era pembelajaran daring (online) akibat pandemi COVID-19 menambah jenis pengeluaran baru seperti langganan platform digital, perangkat teknologi, dan pelatihan guru dalam penguasaan TIK. Hal ini menunjukkan bahwa komponen biaya operasional tidak statis, melainkan harus adaptif terhadap dinamika pendidikan dan sosial.

Dengan demikian, pemahaman dan pengelolaan biaya operasional pendidikan menjadi bagian penting dalam tata kelola pendidikan yang baik. Pengambilan keputusan terkait anggaran harus berdasarkan pada perencanaan strategis, akuntabilitas, serta transparansi untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pendidikan.

#### **KESIMPULAN**

Bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat dan tidak langsung menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. Dengan memahami berbagai jenis pembiayaan pendidikan, pengelola pendidikan diharapkan mampu menyusun strategi penganggaran dan alokasi dana yang tepat sasaran. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat

juga perlu terus bersinergi dalam menjamin keberlangsungan pendidikan yang merata dan bermutu. Transparansi, efisiensi, dan keadilan menjadi prinsip dasar dalam sistem pembiayaan pendidikan yang ideal di era modern ini. pemahaman dan pengelolaan biaya operasional pendidikan menjadi bagian penting dalam tata kelola pendidikan yang baik. Pengambilan keputusan terkait anggaran harus berdasarkan pada perencanaan strategis, akuntabilitas, serta transparansi untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I. (2023). *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Caniago, P., Elfindri, E., & Sari, D. T. (2021). Education Cash Transfer and High School Enrollment in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 10(2), 184–204. [https://doi.org/10.15294/edaj.v10i2.43922]
- Elliott, W., & Lewis, M. (2015). The Real College Debt Crisis: How Student Borrowing Threatens Financial Well-Being and Erodes the American Dream. *Time*. Retrieved from [https://time.com/3980583/student-debt-crisis/](https://time.com/3980583/student-debt-crisis/)
- Elmira, S., & Suryadarma, D. (2020). Why are low-income eligible students reluctant to apply for financial aid? An empirical study from Central Java, Indonesia. *Asia Pacific Education Review*. [https://doi.org/10.1007/s12564-024-09973-2](https://doi.org/10.1007/s12564-024-09973-2)
- Hartati, S., & Nugroho, A. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Dana BOS dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, R., & Fitriani, S. (2023). Kesenjangan Akses Pendidikan dan Peran Masyarakat dalam Pembiayaan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 134–145. [https://doi.org/10.21009/jmp.14210](https://doi.org/10.21009/jmp.14210)
- Investopedia. (2015). What Is the Human Capital Theory and How Is It Used? Retrieved from [https://www.investopedia.com/ask/answers/032715/what-human-capital-and-how-it-used.asp]
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2021). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, A., & Lestari, I. (2022). *Manajemen Keuangan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, W. S., & Jamilatuzzahro, M. (2024). Bridging the Educational Divide: Making Higher Education Affordable for All. *EQUITAS FEB UGM*. Retrieved from [https://equitas.feb.ugm.ac.id/2024/08/07/bridging-the-educational-divide-making-higher-education-affordable-for-all/]
- Pratama, R., & Nuraini, S. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembiayaan Pendidikan: Studi Kasus Sekolah Menengah Negeri di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 10(1), 45–58. [https://doi.org/10.21009/japi.101.04](https://doi.org/10.21009/japi.101.04)
- Purwanto, A. (2022). *Manajemen Keuangan Pendidikan: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Putri, D. A. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Dana Pendidikan di Era Digitalisasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, 10(1), 44–56. [https://doi.org/10.1234/jakp.v10i1.2022](https://doi.org/10.1234/jakp.v10i1.2022)
- Raharjo, S. (2021). Pembiayaan Pendidikan dan Implikasinya terhadap Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 15(2), 103–115. [https://doi.org/10.32678/jipe.v15i2.4321](https://doi.org/10.32678/jipe.v15i2.4321)
- Riswandha, A. (2021). Kemitraan Strategis antara Lembaga Pendidikan dan Dunia Usaha dalam Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 9(3), 88–97. [https://doi.org/10.31940/jpp.v9i3.3210](https://doi.org/10.31940/jpp.v9i3.3210)
- Rohiat, R. (2021). *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Aplikasinya*. Bandung: Refika Aditama.

- Suharto, D. (2021). *Ekonomi Pendidikan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryadi, A. (2022). Kebijakan Anggaran Pendidikan di Indonesia: Antara Regulasi dan Realisasi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(3), 221–234. [<https://doi.org/10.24832/jkpp.v7i3.5678>](<https://doi.org/10.24832/jkpp.v7i3.5678>)
- Suryadi, A. (2022). Tantangan dan Strategi Pembiayaan Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 18(1), 15–27. [<https://doi.org/10.23887/jpn.v18i1.46321>](<https://doi.org/10.23887/jpn.v18i1.46321>)
- Suryadi, A., & Susilana, R. (2022). *Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Era Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Syaibani, R. 2012. Studi Kepustakaan, (Online), (<http://repository.usu.ac.id/bitstream>, diakses 4 Oktober 2016).
- Yuliani, L. (2021). Dampak Digitalisasi terhadap Biaya Operasional Sekolah di Masa Pandemi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2), 135–148. [<https://doi.org/10.17509/jap.v28i2.34567>](<https://doi.org/10.17509/jap.v28i2.34567>)